



e-ISSN3032-601X & p-ISSN3032-7105

Vol. 1, No. 2, Tahun 2024

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 1, No. 2, 2024

Pages: 189–195

Analisis Pembangunan Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Shinta Ferlita, Eli Apud Saepudin, Putri Suci Maharani, Irvan Pajar Kurniawan,
Sindi Susilawati, Riza Zidan Al Fauzan

Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Bina Bangsa, Kota Serang, Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v1i2.1417>

How to Cite this Article

APA : Ferlita, S., Saepudin, E. A., Maharani, P. S., Kurniawan, I. P.,
Susilawati, S., & Al Fauzan, R. Z. (2024). Analisis Pembangunan
Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur
di Indonesia. *MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in
Science, Technology and Educational Research*, 1(2), 189 – 195.
<https://doi.org/10.32672/mister.v1i2.1417>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



9 773032 710001 9 773032 601002

Analisis Pembangunan Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Shinta Ferlita^{1*}, Eli Apud Saepudin², Putri Suci Maharani³, Irvan Pajar Kurniawan⁴, Sindi Susilawati⁵, Riza Zidan Al Fauzan⁶

Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Bina Bangsa, Kota Serang, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

Email:

^{1*}ferlitashinta@gmail.com, ²eli.apud.saepudin@binabangsa.ac.id,

³mputrisuci@gmail.com, ⁴irvanpajar52@gmail.com, ⁵sindisusilawati240@gmail.com,

⁶alfauzanrizazidan@gmail.com

Diterima: 29-03-2024

| Disetujui: 30-03-2024

| Diterbitkan: 31-03-2024

ABSTRACT

Infrastructure development has become one of the main focuses of the Indonesian government in recent years. One of the main challenges is budget constraints. To overcome these budget limitations, the government needs to look for new sources of funding, such as through collaboration with the private sector. Another challenge is the inequality of infrastructure development. Infrastructure development in remote areas is still lagging behind compared to infrastructure development in urban areas. To overcome this, the government needs to prioritize infrastructure development in remote areas. Although there are several challenges, there are also several opportunities to improve infrastructure development in Indonesia. One of the opportunities that exists is increased investment from the private sector. The government needs to create a conducive investment climate so that private parties are interested in investing in infrastructure. Another opportunity is technological progress. New technology can be used to accelerate infrastructure development and improve infrastructure quality. Infrastructure development is one of the keys to encouraging economic growth and improving community welfare. The central and regional governments have made various efforts to improve infrastructure development in Indonesia. Although there are several challenges faced, there are also several opportunities to improve infrastructure development in Indonesia.

Keywords: Infrastructure, Development, Government.

ABSTRAK

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus utama pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Bahwa Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan anggaran. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran ini, pemerintah perlu mencari sumber-sumber pendanaan baru, seperti melalui kerjasama dengan pihak swasta. Tantangan lainnya adalah ketidakmerataan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil masih tertinggal dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur di wilayah perkotaan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil. Meskipun terdapat beberapa tantangan, terdapat juga beberapa peluang untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Salah satu peluang yang ada adalah meningkatnya investasi dari pihak swasta. Pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif agar pihak swasta tertarik untuk berinvestasi di bidang infrastruktur. Peluang lainnya adalah kemajuan teknologi. Teknologi baru dapat digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas infrastruktur. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Meskipun terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, terdapat juga beberapa peluang untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Katakunci: Pembangunan, Infrastruktur, Pemerintah

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan kemajuan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan ketahanan nasional suatu negara. Di Indonesia, sebagai negara kepulauan yang luas dengan keragaman geografis dan kebutuhan masyarakat yang beragam, pembangunan infrastruktur menjadi semakin vital. Dalam konteks ini, peran pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting. Pemerintah pusat, melalui berbagai kementerian dan lembaga, bertanggung jawab untuk merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengimplementasikan pembangunan infrastruktur secara nasional. Dukungan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan kebijakan-kebijakan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar utama pelaksanaan pembangunan infrastruktur ini. Namun, pemerintah daerah juga memainkan peran penting. Mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebutuhan infrastruktur di daerahnya masing-masing. Dengan pengetahuan lokal ini, pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota bertanggung jawab untuk merumuskan rencana pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal.

Kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat penting dalam mengimplementasikan program pembangunan infrastruktur secara efektif dan efisien. Koordinasi yang baik antara kedua tingkat pemerintahan ini merupakan kunci untuk menghindari tumpang tindih program, memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, dan memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dalam analisis ini, kami akan membahas lebih lanjut mengenai peran masing-masing pemerintah, tantangan yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan oleh kedua tingkat pemerintahan, koordinasi, dan strategi untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Indonesia secara holistik. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika antara pemerintah pusat dan daerah dalam konteks pembangunan infrastruktur, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan memajukan pembangunan nasional secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan literatur review yang bersifat deskriptif. Adapun tujuan penggunaan metode ini dalam membuat dan menyusun penelitian tentang Memproyeksikan pemerintah dalam pembangunan nasional yang mana tentunya masih banyak sekali ketimpangan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang ada di Indonesia sehingga pemerataan pembangunan sangat membutuhkan waktu yang sangat lama, tidak hanya mengandalkan pemerintah pusat tentunya pemerintah daerah pun bisa ikut andil dalam pembangunan infrastruktur di daerah dengan adanya APBD.

Memberikan landasan teori yang kuat untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti dan berkelanjutan Memperkuat argumen dan pemahaman mengenai peran pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan infrastruktur dan tantangan yang dihadapi. Dan tentunya perlu koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah serta antara sektor publik dan swasta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan pembangunan infrastruktur itu sendiri dapat dipengaruhi oleh faktor politik, sosial, ekonomi dan lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan layanan infrastruktur yang berkualitas, baik dalam bentuk pengaturan dengan kerangka regulasi maupun kerangka investasi melalui rehabilitasi dan peningkatan kapasitas fasilitas infrastruktur yang rusak, serta pembangunan baru. Kerangka kebijakan regulasi dan kerangka investasi diharapkan akan dapat meningkatkan ketersediaan fasilitas dan layanan infrastruktur (Basri, 2002). Menurut Susantono (2013), pembangunan infrastruktur di Indonesia seolah mendapat kembali momentum melalui peluncuran MP3EI pada 27 Mei 2011.

MP3EI dimaksudkan untuk membuat terobosan (breakthrough) dan bukan “*business as usual*” untuk mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berimbang, berkeadilan, dan berkelanjutan. MP3EI kini menjadi panduan bagi proses perencanaan nasional yang menggabungkan konsep perencanaan kewilayahan dan sektoral. Peningkatan pertumbuhan PDRB yang tinggi, sangat dipengaruhi oleh tersedianya infrastruktur transportasi pada suatu wilayah. Namun dari sisi penawaran (side supply), pemerintah terkendala dengan minimnya investasi (dana) untuk pemeliharaan maupun pembangunan baru untuk infrastruktur transportasi.

Sedangkan di sisi lain, permintaan (side demand) terhadap infrastruktur transportasi sangat tinggi karena jumlah penduduk dalam Kota Ambon bertambah padat. Dengan demikian moda transportasi bertambah pula untuk memenuhi permintaan pengguna jasa angkutan (bandingkan dengan Basri dan Munandar, 2009). Walaupun ada upaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan/atau prasarana transportasi, memerlukan waktu yang tidak singkat dan dengan biaya yang besar. Oleh karena itu, menuntut adanya fokus serta keseriusan dalam mewujudkannya. Untuk menjamin bahwa pembangunan proyek tersebut dapat berjalan, mulai dari tahapan persiapan hingga operasi secara berkelanjutan diperlukan suatu kebijakan yang sinergis, solid, konsisten, dan tepat waktu dengan tetap menjaga kaidah-kaidah good governance (Susantono, 2013). Peran lainnya, adalah infrastruktur sebagai prasarana jaringan dasar dari keberadaan dari suatu kota atau wilayah merupakan faktor penting didalam keberlangsungan dan pertumbuhan kota atau wilayah (Grigg, 1998).

Apabila dalam penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi tidak dilakukan dengan baik, maka jaringan kota atau simpul kegiatan perkotaan didalam suatu wilayah menjadi terganggu, yang selanjutnya berdampak kepada degradasi sistem ekonomi dan sosial masyarakat (Kodoatie, 2003). Pembangunan infrastruktur sangat diperlukan di dalam proses pertumbuhan ekonomi karena dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, sehingga menciptakan lapangan kerja baru, menurunkan tingkat kemiskinan, dan meningkatkan pendapatan perkapita. Infrastruktur berperan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pembangunan infrastruktur yang baik akan menjamin efisiensi, memperlancar pergerakan barang dan jasa, dan meningkatkan nilai tambah perekonomian (Prasetyo dan Firdaus 2009). Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor pendorong produktivitas daerah.

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Pertumbuhan ini merupakan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang, terdistribusi di berbagai wilayah, dan dapat mengurangi ketidaksetaraan pendapatan. Pembangunan yang berkelanjutan menjadi syarat perlu bagi keberhasilan suatu negara, namun demikian belum cukup apabila tidak diikuti dengan pembangunan yang inklusif. Pembangunan yang inklusif dimaknai sebagai pertumbuhan yang tidak hanya menciptakan peluang ekonomi baru, tetapi juga menjamin aksesibilitas yang sama terhadap peluang yang tercipta untuk semua segmen masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin (Prasetyo dan Firdaus 2009).

Pertumbuhan inklusif merupakan bagian besar dari pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam kesepakatan global mengenai Sustainable Development Goals (SDGs). yaitu pertumbuhan ekonomi yang dapat menciptakan pemerataan, menurunkan kemiskinan dan pengangguran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Empat indikator tersebut dapat didefinisikan pertumbuhan ekonomi yang dapat mereduksi kemiskinan, ketimpangan pendapatan antar individu, dan tingkat pengangguran (Klasen2010, Ianchovichina, dan Gable 2012). Menurut Prof. Dr. Wibowo, S.E (2013:7) menjelaskan kinerja berasal dari pengertian Performance. Ada pula yang memberikan pengertian performance sebagai hasil kerja atau prestasi kerja, namun sebenarnya kinerja mempunyai makna yang luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung.

Moeheriono (2012:95) mengatakan bahwa kinerja atau performance merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Simon Kuznets menyatakan, pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh akumulasi modal (investasi pada tanah, peralatan, prasarana dan sarana dan sumber daya manusia), sumber daya alam, sumber daya manusia, baik jumlah maupun tingkat kualitas penduduknya, kemajuan teknologi, akses terhadap informasi, keinginan untuk melakukan inovasi dan mengembangkan diri serta budaya kerja (Haryanto). Penyediaan infrastruktur berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah dan menurunkan kemiskinan (Sumardjoko, 2019). Menurut pendapat Argyris, dkk (Hutapea,2017) Strategi merupakan respon secara terus menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang membuat dampak dalam perkembangan dalam sebuah organisasi.

Pemerataan sumberdaya infrastruktur mampu mengurangi kemiskinan dan mempengaruhi distribusi pendapatan yaitu ketika terjadi peningkatan produktifitas dan perluasan dana investasi yang dilakukan oleh pelaku perekonomian negara (Serven, 2004). Penyediaan infrastruktur yang efektif, efisien serta berkelanjutan merupakan faktor pendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi (Chen & Bartle, 2017). Infrastruktur adalah sebuah sistem fasilitas publik, yang bersifat fundamental di tujukan kepada masyarakat/khalayak ramai untuk melayani dan memudahkan masyarakat (Hudson, et al:1997). Dengan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur, seperti perluasan akses transportasi yang layak, penambahan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang merata, serta pembangunan jaringan listrik, air, dan telekomunikasi, akan meningkatkan produktivitas masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat tercapai (Munawaroh dkk., 2021). Beberapa fakta empiris menunjukkan bahwa perkembangan kapasitas infrastruktur di suatu wilayah berjalan seiring dengan perkembangan ekonominya (Calderón & Servén, 2004; Démurger, 2001; Maryaningsih, Hermansyah, & Savitri, 2014).

KESIMPULAN

Tujuan penelitian tentang analisis pembangunan nasional pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan infrastruktur di Indonesia adalah untuk mengevaluasi peran serta kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan infrastruktur yang efisien dan efektif. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa koordinasi yang lebih baik antara kedua tingkatan pemerintahan akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Dalam konteks ini, analisis dilakukan terhadap berbagai aspek pembangunan infrastruktur,

termasuk alokasi sumber daya, implementasi kebijakan, pengambilan keputusan, serta progres pembangunan secara keseluruhan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kerjasama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kemajuan pembangunan infrastruktur.

Pertama-tama, kolaborasi yang efektif antara kedua tingkatan pemerintahan memungkinkan untuk alokasi sumber daya yang lebih optimal. Dengan berbagi informasi dan sumber daya, pemerintah pusat dan daerah dapat mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur yang mendesak dan mengalokasikan anggaran secara proporsional. Hal ini memastikan bahwa proyek infrastruktur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan lokal dan nasional, sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Kedua, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih tepat. Dengan adanya dialog yang terbuka dan transparan, kedua pihak dapat saling memahami kepentingan dan kebutuhan masing-masing. Ini meminimalkan risiko keputusan yang tidak terkoordinasi atau bertentangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang dapat menghambat kemajuan pembangunan infrastruktur.

Ketiga, implementasi kebijakan yang terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah memungkinkan untuk penyelenggaraan proyek infrastruktur yang lebih efisien. Dengan standar operasional yang seragam dan prosedur yang terintegrasi, proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring proyek infrastruktur dapat dilakukan dengan lebih lancar. Ini meminimalkan kemungkinan terjadinya hambatan administratif atau teknis yang dapat menghambat kemajuan proyek.

Dengan demikian, kesimpulan dari analisis ini adalah bahwa kerjasama yang solid antara pemerintah pusat dan daerah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dukungan terhadap hipotesis bahwa koordinasi yang lebih baik antara kedua tingkatan pemerintahan akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan infrastruktur telah terbukti. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia, penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk terus meningkatkan kolaborasi dan koordinasi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama & Widowati, 2017; Afriyana et al., 2023; Akhmadi & Priastawa, 2021; Erlianti & Fajrin, 2021; Hendra Andy Mulia Panjaitan et al., 2020; Ilmia, 2020; Kasmira et al., 2020; Latif et al., 2019; Palilu, 2019; E. S. Putri & Wisudanto, 2017; N. C. Putri & Putri, 2020; Sukwika, 2018; Utomo, 2019; Vina Maria Ompusunggu, S.Sos., 2019; Wirabrata & Surya, 2011) Aditama, P. B., & Widowati, N. (2017). Analisis Kinerja Organisasi Pada Kantor Kecamatan Blora. *Journal of Public and Management Review*, 6(2), 1–12. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/15994>
- Afriyana, L., Salmah, E., Sriningsih, S., Harsono, I., & Kunci, K. (2023). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pada Kabupaten / Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016-2021 Info Artikel Keywords : Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor selain atensi Pem. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(1), 1–12.
- Akhmadi, H., & Priastawa, P. N. (2021). Analisis Manfaat Penyertaan Modal Negara Pada Program Pembangunan Infrastruktur Listrik Desa Provinsi Bali. *Bina Ekonomi*, 25(1), 8–22.

- <https://doi.org/10.26593/be.v25i1.5114.8-22>
- Erlianti, D., & Fajrin, I. N. (2021). Analisis Dimensi Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 1(1), 68–75. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i1.1869>
- Hendra Andy Mulia Panjaitan, Sri Mulatsih, & Wiwiek Rindayati. (2020). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 8(1), 43–61. <https://doi.org/10.29244/jekp.v8i1.29898>
- Ilmia, A. (2020). *Keywords : Infrastructure , Development , Financing , SBSN , Sovereign Sukuk*. 1(2), 22–35.
- Kasmira, Alyas, & Sudarmi. (2020). Strategi Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 1(3), 818–833. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/3737>
- Latif, A., Irwan, Rusdi, M., Mustanir, A., & Sutrisno, M. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal MODERAT*, 5(1), 1–15. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1898>
- Palilu, A. (2019). Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Transportasi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kota Ambon. *Buletin Studi Ekonomi*, 23(2), 227. <https://doi.org/10.24843/bse.2018.v23.i02.p06>
- Pratiwi, A., Saipudin, E. A., Hotimah, N., Maulidah, S., & Yuliyani. (2024). Analisis dalam Merancang Konsep Ekonomi Kebijakan: kebijakan Ekonomi. *MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(2), 179–183. <https://doi.org/10.32672/mister.v1i2.1306>
- Putri, E. S., & Wisudanto, W. (2017). Struktur Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Penunjang Pertumbuhan Ekonomi. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 3(5), 222–228. <https://doi.org/10.12962/j23546026.y2017i5.3136>
- Putri, N. C., & Putri, L. Y. (2020). Analisis pembiayaan non-anggaran pemerintah dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. *Jurnal Infrastruktur*, 6(2), 91–103.
- Safina, S., Saepudin, E. A., Damayanti, A. S., Yani, L. R., Edista, L., & Cahyani, S. (2024). Analisis Ekonomi Politik Neoklasik dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. *MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(2), 137–142. <https://doi.org/10.32672/mister.v1i2.1302>
- Sarsina, W., Silas Adian Sampe, Laode Eriman, Nurdan, Lis Ayucandra, & Gilang Syaputra. (2024). Pengembangan Alternatif Kebijakan dalam Pembiayaan Pembangunan Desa. *LANCAH: Jurnal Inovasi Dan Tren*, 2(1), 44–52. <https://doi.org/10.35870/ljit.v2i1.2218>
- Sufriadi, D. (2018). Analisis transformasi struktural perekonomian Aceh. *EKOMBIS: JURNAL FAKULTAS EKONOMI*, 3(2).
- Sukwika, T. (2018). Peran Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 6(2), 115. <https://doi.org/10.14710/jwl.6.2.115-130>
- Triyatni, D., Harsono, I., Endang Astuti, Himawan Sutanto, & Ida Ayu Putri Suprpti. (2024). Analisis Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram Tahun 2013-

2022. *LANCAH: Jurnal Inovasi Dan Tren*, 2(1), 91~98. <https://doi.org/10.35870/ljit.v2i1.2240>
- Utomo, B. T. (2019). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Sinjai. *Urban and Regional Studies Journal*, 1(2), 50–57. <https://doi.org/10.35965/ursj.v1i2.1081>
- Vina Maria Ompusunggu, S.Sos., M. (2019). Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://jurnal.stkippgritulungagung.ac.id/index.php/jupeko/article/download/870/397>
- Wirabrata, A., & Surya, T. A. (2011). Masalah kebijakan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 2, No, 729–752.